

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Tahun Semester 1 Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025. Realisasi Pendapatan Negara sampai pada 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.429.567 dibandingkan dengan pada 31 Desember 2024 Rp 17.372.200. Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 3.936.231.382, atau mencapai 27.54 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 14.293.185.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 13.103.020.963 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 736.774.670 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 12.366.246.293 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 224.405.908 dan Rp 12.878.615.055

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp

(6.435.269.208), sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 6.435.269.208 dibandingkan pada periode 31 Desember 2024 Rp 8.780.954.731 Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya pada periode 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp 2.429.567 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 6.432.839.641 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024 Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 8.770.561.723

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp 15.377.868.706 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(6.432.839.641) dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan dikurangi dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 3.933.585.990 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp 12.878.615.055, dibandingkan pada Tahun Anggaran 2024 Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp 19.039.118.302 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(8.770.561.723) dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 4.609.001 dan dikurangi dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 6.768.289.645 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 17.032.237.223

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode sampai dengan 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE 30 JUNI 2025 DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2025		% thd Angg	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	2.429.567	100,00	17.372.200
JUMLAH PENDAPATAN		-	2.429.567	100,00	17.372.200
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	3.690.643.000	2.033.357.787	55,09	2.254.123.525
Belanja Barang	B.4	10.415.528.000	1.879.673.595	18,05	7.719.738.480
Belanja Modal	B.5	187.014.000	23.200.000	12,41	630.234.150
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		14.293.185.000	3.936.231.382	27,54	10.604.096.155

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA
NERACA
PER 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
T			
T LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	60.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	676.774.670	550.725.642
Jumlah Aset Lancar		736.774.670	550.725.642
TANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
T TETAP			
Tanah	C.14	2.228.156.034	2.228.156.034
Peralatan dan Mesin	C.15	39.890.619.437	39.866.263.237
Gedung dan Bangunan	C.16	10.071.443.993	10.071.443.993
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	995.251.376	995.251.376
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	40.819.224.547	38.514.679.056
Jumlah Aset Tetap		12.366.246.293	14.646.435.584
T LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	385.000	385.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(385.000)	(385.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		13.103.020.963	15.381.403.788
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	60.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	157.028.108	3.535.082
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	7.377.800	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		224.405.908	3.535.082
JUMLAH KEWAJIBAN		224.405.908	3.535.082
LIABILITAS KEWAJIBAN			
Ekuitas	C.28	12.878.615.055	15.377.868.706
JUMLAH EKUITAS		12.878.615.055	15.377.868.706
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		13.103.020.963	15.381.403.788

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 31 Desember
2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.159.576.895	2.295.776.356
Beban Persediaan	D.3	29.264.700	70.784.150
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.520.266.174	2.938.361.073
Beban Pemeliharaan	D.5	266.158.485	360.685.998
Beban Perjalanan Dinas	D.6	156.829.488	757.067.481
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2.303.173.466	2.358.279.673
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		6.435.269.208	8.780.954.731
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6.435.269.208)	(8.780.954.731)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		2.429.567	10.393.008
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		2.429.567	15.570.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		5.356.992	5.356.992
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.429.567	10.393.008
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		6.432.839.641	8.770.561.723
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		6.432.839.641	8.770.561.723

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 31 Desember
2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	15.377.868.706	19.039.118.302
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6.432.839.641)	(8.770.561.723)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	(4.609.001)	(4.609.001)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5		(4.617.112)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	8.111
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3.933.585.990	6.768.289.645
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2.499.253.651)	(2.006.881.079)
EKUITAS AKHIR	E.5	12.878.615.055	17.032.237.223

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna

<i>Dasar Hukum</i>	Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: per.33/pERMEN-Kp/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, antara lain: 1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan sumber dayakelautan dan perikanan; 2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 3. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan; 5. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; 7. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
<i>Entitas dan Rencana Strategis</i>	

8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna berkomitmen dengan visi ***“pelaksanaan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang terawasi, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan di lingkup Stasiun PSDKP Tahuna”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja.
- Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja.
- Meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah kerja.
- Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggungjawab dan berkelanjutan di wilayah Stasiun PSDKP Tahuna.

Arah kebijakan dan Strategi Kementerian Lembaga, Memberantas IUU Fishing untuk meningkatkan kedaulatan Ekonomi, Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian dan keberlanjutan usaha masyarakat kelautan dan perikanan.

Stasiun PSDKP Tahuna memiliki Sumber daya Manusia bidang kelautan dan perikanan yang berstatus PNS sebanyak 27, PPPK sebanyak 4 orang, PPNP sebanyak 7

Orang dan PJLP sebanyak 10 Orang

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester Satu ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun PSDKP Tahun. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Pengawasan SDKP Tahunana menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Tahunan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah

sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Rapat pembahasan permasalahan SIMAK Barang

Milik Negara (BMN) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait permasalahan pencatatan dan pelaporan BMN Tahun 2017 dan 2018

1. Kebijakan akuntansi dan pencatatan persediaan

a. Persediaan Biota Ikan

- KSAP belum mengatur standar akuntansi terkait aset biologis sebagai persediaan;
- Perlu ada standar akuntansi untuk mencatat aset biologis, dhi. di lingkungan KKP berupa Persediaan biota ikan;
- KKP telah menerbitkan:
 - 1) Perdirjen Perikanan Budidaya Perdirjen PB No.300/PER-DJPB/2019 tanggal 28 September 2019 tentang pedoman umum penatausahaan barang persediaan kegiatan perekayasaan dan produksi di unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
 - 2) SE Sekjen No.B.1550/SJ/PL.930/XII/2019 pada tanggal 28 Desember 2019 tentang penatausahaan barang milik negara berupa persediaan;
- KKP perlu melakukan evaluasi kembali atas SE Sekjen dan Perdirjen Perikanan Budidaya terkait pencatatan persediaan khususnya persediaan biota ikan yang disesuaikan dengan karakteristik nilai dan kuantitas persediaan (PNBP atau metode lainnya).

b. Persediaan Suku Cadang Kapal

- Suku cadang kapal sesuai karakteristiknya tetap

dicatat sebagai persediaan;

- KKP perlu membuat kartu kendali persediaan suku cadang serta melakukan stok opname fisik pada akhir periode baik yang ada di gudang maupun yang ada di kapal.

c. Persediaan BBM Kapal

- Pencatatan persediaan BBM Kapal dikeluarkan dari Neraca namun perlu diungkap dalam CaLK KKP;
- BBM yang berada di kapal diperlakukan sebagai beban persediaan pada saat BBM diisi ke tangki kapal;
- Mengutip pernyataan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tingkat akurasi hasil stok opname fisik BBM di kapal tergantung pada posisi dan kondisi kapal;
- Cost untuk menghitung persediaan BBM Kapal lebih besar dibandingkan benefit dari pencatatan BBM Kapal, karena secara substansi KKP tidak memiliki gudang penyimpanan BBM kapal;
- KKP perlu membuat aturan terkait mekanisme pengendalian penggunaan BBM oleh Kapal, untuk mencegah penyalahgunaan BBM Kapal sebagai laporan manajerial;
- Di Tahun 2020 diperlukan review ulang atas penganggaran belanja BBM yang selama ini sebagai belanja persediaan

2. Pencatatan Aset Tetap & Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

a. Aset Tetap

- Aset Tetap Tanah yang bersaldo tidak normal, merupakan aset urugan untuk pematangan tanah senilai Rp1,88 miliar sebanyak 3 NUP di atas tanah milik Pemprov Sumatera Utara, Jambi, dan Sulawesi Tengah
 - Aset tanah di atas tanah pemda, dilakukan koreksi menjadi ATR pada Satker Konsolidasi di tahun 2019 dan akan dilakukan koreksi di tingkat satker di tahun 2020. Selanjutnya KKP akan melakukan proses hibah ATR tersebut ke pemda terkait.
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp156 jt secara substansi merupakan persediaan habis pakai dan nilai buku sudah nihil. KKP di tahun 2020 akan melakukan penghapusan aset tersebut.
- Transaksi penyusutan tidak wajar senilai Rp50,98 miliar:
 - KKP akan mengungkapkan adanya penyusutan tidak wajar pada laporan keuangan Tahun 2019.
 - KKP akan melakukan koordinasi dengan Kemenkeu untuk menyelesaikan penyusutan tidak wajar pada Aplikasi SIMAK di Tahun 2020

b. KDP

- Saldo KDP perolehan 2008-2017 sebanyak 281 NUP bernilai negatif senilai Rp78,87 Miliar
 - Aset KDP bernilai negatif tidak mempengaruhi nilai saldo KDP di Neraca KKP per 31 Desember 2018, karena KDP yang dimaksud bernilai negatif per NUP juga memiliki nilai positif di NUP yang berbeda atas KDP yang sama.
 - KDP bernilai negatif terjadi karena satker saat melakukan penginputan KDP menjadi aset defenitif menggunakan NUP yang berbeda dengan NUP KDP awal.
 - NUP Aset KDP yg telah ditemukan aset defenitifnya sebanyak 105 NUP senilai Rp40,10 miliar.
- KDP memiliki transaksi mutasi yang tidak wajar senilai Rp0,79 Milyar antara lain penambahan/pengembangan/transfer masuk dinilai minus, transfer keluar dinilai positif yang merupakan bagian dari KDP sebanyak 281 NUP bernilai negatif sebesar Rp78,87 Miliar
- Mutasi keluar dari KDP senilai Rp3,18 Milyar tidak menambah aset tetap
 - Sebesar Rp1,9 Miliar sedang dilakukan inventarisasi.
 - Sebesar Rp1,2 Miliar telah ditemukan asetnya dan akan dicatat sebagai penambahan saldo awal pada Tahun 2020

3. ATB

- Saldo Hasil Kajian/Penelitian (Rekomendasi Teknologi) senilai Rp11,09 miliar akan dilakukan koreksi pada laporan keuangan Tahun 2019 karena secara substansi bukan merupakan ATB.
- Saldo Paten senilai Rp12,70 Miliar belum memasukkan:
 - 4 Paten belum jelas status sertifikatnya
 - 6 Paten sudah memiliki sertifikat
 KKP akan melakukan inventarisasi biaya perolehan.
- Amortisasi :
 - Amortisasi 26 paten senilai Rp1,04 Miliar belum didukung bukti pendaftaran.
 - Tanggal penerimaan 10 paten senilai Rp0,41 Miliar berbeda dengan tanggal perolehan untuk perhitungan amortisasinya.
 KKP akan melakukan inventarisasi bukti pendaftaran dan tanggal perolehan ATB.
- ATB pada Direktorat Pakan dan Obat Ikan tidak ditemukan senilai Rp221,48 juta
 - KKP telah mengidentifikasi jenis ATB tersebut. Selanjutnya akan dilakukan inventarisasi dokumen perolehan ATB. Apabila ATB tersebut sudah tidak digunakan akan dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

*Aset Tetap***b. Aset Tetap**

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh

sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa

kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70
------------------------------	----

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- ✚ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- ✚ Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- ✚ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat

pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna (170445) Nomor: SP DIPA-032.05.2.170445/2025 tanggal 2 Desember 2024, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.14.293.185.000,- (*Empat belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*). Nilai anggaran tersebut terdiri dari 2 (dua) program, yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan serta Program Dukungan Manajemen. Penjabaran 2 (dua) program tersebut dicakup dalam 4 (empat) kegiatan utama, yaitu: Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP, Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Dukungan Manajemen Internal. Sampai pada Triwulan II tahun 2025, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna (170445) telah melakukan revisi anggaran sebanyak 8 (delapan) kali.

Realisasi

*Pendapatan Rp
2,429,567*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 2,429,567. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025	
	Anggaran	Realisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	2.429.567
Penerimaan Hibah	-	-
Jumlah	-	2.429.567

PNBP lainnya tahun 2025 berasal dari hasil penjualan lelang peralatan dan mesin tanggal 9 Januari 2025 NTPN; 9B6BD0NA0DE65VCD, NTB; 972052809479 Rp.2,429,567 sesuai risalah lelang nomor 4/16.01/2025-01 tanggal 9 Januari 2025

Perbandingan Realisasi Pendapatan Periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	30 Juni 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara	2.429.567	17.372.200	715,03
Penerimaan Hibah	-	-	0,00
Jumlah	2.429.567	17.372.200	0,00

Dari tabel perbandingan diatas terlihat adanya penurunan pendapatan pada tahun 2025, Jika dibandingkan dengan tahun 2024

*Realisasi Belanja
Negara Rp
3.936.231.382*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 3,936,231,382 atau 27,54% dari anggaran belanja sebesar Rp 14,293,185,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.690.643.000	2.033.357.787	55,09%
Belanja Barang	10.415.528.000	1.879.673.595	18,05%
Belanja Modal	187.014.000	23.200.000	12,41%
Belanja Bantuan Sosial		-	0,00%
Total Belanja Kotor	14.293.185.000	3.936.231.382	27,54%
Pengembalian	-	-	0,00%
Jumlah	14.293.185.000	3.936.231.382	27,54%

Realisasi anggaran tahun 2025 menurut jenis belanja, seperti pada tabel diatas, memperlihatkan bahwa sampai dengan bulan Juni 2025, Nilai belanja yang paling sedikit terdapat pada jenis Belanja Modal, hal ini di karenakan kurangnya Pembangunan konstruksi serta efisiensi anggaran TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	30 Juni 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.033.357.787	2.163.588.475	-6,02%
Belanja Barang	1.879.673.595	4.282.653.520	-56,11%
Belanja Modal	23.200.000	339.419.850	-93,16%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	3.936.231.382	6.785.661.845	-42%

Jika dilihat pada tabel perbandingan jenis belanja tahun 2025 dan 2024 diatas, terjadi penurunan dikarenakan efisiensi anggaran.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Stasiun PSDKP Tahun

terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dan V dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional yang pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 10 kegiatan prioritas, yang tersebar di Stasiun PSDKP Tahuna dengan pagu mencapai Rp 7.503.277.000 dan realisasi sebesar Rp 989.880.673 dengan rincian sebagai berikut:

4	Kegiatan	Uraian RO	Belanja (Uraian UMS-PAN)			Keuangan (Uraian SAKTI)							
			Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini		
								RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)
5	2350	Operasi Kapal Pengawas	5.612.345.000	739.764.331	13,18	31	Operasi	0	0	13,18	10	30	33,8
6	2350	Operasi Speedboat Pengawas	329.200.000	96.098.000	29,19	20	Operasi	0	0	0	15	50	77,92
7	2350	Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	988.530.000	128.997.630	13,05	3	Unit	0	0	13,05	0	0	38,87
8	2351	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	50.000.000	0	0	1	kegiatan	0	100	0,1	0	100	0,1
9	2351	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	30.080.000	0	0	1	Perkara	0	100	0	0	100	0
10	2351	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	116.375.000	22.170.712	19,05	1	Perkara	0	100	0	0	100	53,67
11	2352	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	124.747.000	0	0	1	Operasi	0	100	0	0	100	0
12	2352	Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	20.000.000	0	0	2	Laporan	0	0	0	0	100	0
13	2352	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	82.000.000	1.800.000	2,2	4	Lembaga	2	30	2,2	3	50	6,59
14	2352	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	150.000.000	1.050.000	0,7	15	Lembaga	6	20	0,7	9	50	2,4
15													

Belanja Pegawai B.3 Belanja Pegawai

Rp

2,033,357,787

Realisasi Belanja Pegawai sampai pada periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,033,357,787 dan Rp. 2,163588,475. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pada TA. 2025 terjadi kenaikan Belanja Pegawai dikarenakan adanya penerimaan PPPK.

Rincian Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	949.613.115	1.816.353.289	52,28%
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	121.206.742	193.228.678	62,73%
Beban Lembur PNS	-	48.910.000	0,00%
Beban Lembur PPPK	-	5.835.000	0,00%
Beban Tunjangan Khusus Kinerja	858.906.120	1.788.071.557	48,04%
Beban Tunjangan Khusus Kinerja PPPK	103.631.810	183.383.671	56,51%
<i>Sub Total</i>	-	-	0,00%
Pengembalian Belanja	-	-	0,00%
Jumlah	2.033.357.787	4.035.782.195	50,38%

Sampai pada periode Periode 30 Juni 2025 tidak ada Pengembalian belanja

Belanja Barang
Rp 1,879.673.595

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,879,673,595 dan Rp. 4,282,653,520 Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2025 mengalami penurunan karena terjadi perubahan pagu anggaran Belanja Barang dalam DIPA Stasiun PSDKP Tahuna.

*Perbandingan Belanja Barang 30 Juni 2025 dan 31
Desembr 2024*

URAIAN	30 Juni 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	299.376.678	1.296.551.204	23,09%
Belanja Barang Non Operasional	757.639.900	5.297.021.735	14,30%
Belanja Barang Persediaan	15.101.700	181.269.980	8,33%
Belanja Jasa	428.597.878	533.029.852	80,41%
Belanja Pemeliharaan	222.127.951	2.563.502.157	8,67%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	156.829.488	2.070.120.980	7,58%
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.			0,00%
Jumlah Belanja Kotor	1.879.673.595	11.941.495.908	15,74%
Pengembalian Belanja		-	0,00%
Jumlah Belanja	1.879.673.595	11.941.495.908	15,74%

- Belanja barang Operasional sebesar Rp. 299,376,678,- meliputi kegiatan pembayaran Belanja penambah Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh, belanja pengiriman surat dinas Pos pusat, belanja keperluan perkantoran, belanja honor operasional satuan kerja.
- Belanja barang non operasional sebesar Rp. 757,639,900- meliputi kegiatan pembayaran Belanja barang non operasional lainnya, belanja bahan, Belanja honor Output Kegiatan.
- Belanja barang persediaan sebesar Rp. 15,101,700,- meliputi kegiatan pembayaran; Belanja barang persediaan barang konsumsi.
- Belanja barang jasa sebesar Rp. 428,597,878,- meliputi kegiatan pembayaran belanja jasa lainnya, jasa profesi, belanja langganan daya dan jasa

lainya, belanja langganan listrik, telepon, dan air dan belanja sewa.

- Belanja barang pemeliharaan sebesar Rp.,222,127,951 ,- meliputi kegiatan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan dan jembatan, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin.
- Belanja barang perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 156,829,488,- meliputi kegiatan pembayaran belanja perjalanan biasa, belanja perjalanan tetap, perjalanan dinas dalam kota, Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.
- Realisasi Penggunaan BBM sampai dengan Juni 2025 sebesar Rp. 998,315,000, sesuai dengan nilai kontrak.

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 23,200,000 dan Rp. 339,419,850 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2025 dan
31 Desember 2024*

*Belanja Modal
Rp 23,200,000*

URAIAN	30 Juni 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.200.000	642.717.800	3,61%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00%
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00%
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin		1.762.108.157	0,00%
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	23.200.000	2.404.825.957	0,96%
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	23.200.000	2.404.825.957	0,96%

Perbandingan nilai Belanja Modal tahun 2025 dan 2024 pada tabel diatas mengalami penurunan yang signifikan, di tahun 2025 belanja modal hanya Pembelian Peralatan dan Mesin berupa A.C Split sejumlah 4 (empat) unit senilai Rp. 23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan masing-masing unit senilai Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). NUP 23 s/d 26 Merk/Type Panasonic Nomor kwitansi 00043/KW/170445/2025.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0, dan Rp.0. Tidak adanya belanja modal tanah karena sudah dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2025 dan 31
Desember 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	0	0	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Modal	-		-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2025 sebesar Rp 23.200.000 untuk pembelanjaan Pengadaan AC

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	30 Juni 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	23.200.000	339.419.850	6,84%
Jumlah Belanja Kotor	23.200.000	339.419.850	6,84%
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	23.200.000	339.419.850	6,84%

Penurunan nilai belanja modal peralatan dan mesin di TA 2025 tidak terlalu besar dibandingkan belanja 2024 karena Nilai dan Jumlah kegiatan yang berbeda.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan *Periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024* adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	30 Juni 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan	0	0	
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

tidak ada penambahan Belanja modal Gedung dan bangunan

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan *Periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2025* adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0. Tidak ada belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jembatan di tahun anggaran 2025

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode 30 Juni
2025 dan 31 Desember 2025*

URAIAN JENIS BELANJA	30 Juni 2025	30 Desember 2025	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	-
Belanja Modal Irigasi	0	0	-
Belanja Modal Jaringan			-
Belanja Penambah Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	-
Belanja Penambah Nilai Irigasi	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya *Periode* 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial *Periode* 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.60,000,000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per *periode* 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.60,000,000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Penerimaan

Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar masing-masing Rp0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya dan **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Setara Kas Rp.0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Kas ini merupakan LS Perjalanan Dinas yang belum ditarik dan dibayarkan

Piutang PNB **C.4 Piutang PNB**

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Lancar
Rp0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2025

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor.

*Belanja Dibayar
di Muka Rp0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus

diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan Rp
676,774,670*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 676,774,670 dan Rp.734,968,204 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 2025 dan 2024

Jenis	30 Juni 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	1.345.000	15.508.000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Suku Cadang	675.429.670	715.009.104
Jumlah	676.774.670	730.517.104

Berikut ini Rincian Persediaan untuk Semester 1 T.A 2025 adalah sebagai berikut; Beban Persediaan Konsumsi terdiri dari Alat Tulis Rp. 30,000 , Tinta

tulis/tinta stempel Rp. 25,000, Penjepit Kertas Rp 42,500. Penggaris Rp. 50,000. Alat Perekat Rp. 487,500 Kertas HVS Rp. 415,000, Tinta Cetak Rp. 165,000.. Alat/bahan kantor lainnya Rp.130,000. berdasarkan Berita Acara Opaname Fisik Persediaan Nomor. B.006/PSDKPSta.6/PL.510/VI/2025 Adapun tabel mutasi persediaan sebagai berikut:

Kode	Uraian	Nilai
117111	Barang Konsumsi	1.345.000
117114	Suku Cadang	675.429.670
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0
	Jumlah	676.774.670

*Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 sebesar Rp0 Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

*Angsuran
Rp0*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 sebesar Rp 0 Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 sebesar Rp0 Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp2.228.156.034*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.2.228.156.034 dan Rp.2.228.156.034 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 2.141 meter persegi senilai Rp 574.030.000.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2.228.156.034
Mutasi tambah:	0
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset	0
Pengembangan melalui KDP	0
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 September 2023	2.228.156.034

Rincian Tanah TA 2025

No	Luas	Lokasi	Nilai 31 Desember 2024	Nilai Koreksi	Nilai 30 Juni 2025
1	561 m2	Kab. Kepulauan Sangihe	257.034.000	-	257.034.000
2	731 m2	Kab. Kepulauan Talaud	95.176.000	-	95.176.000
3	849 m2	Kab. Kepulauan Talaud	221.820.000	-	221.820.000
4	1500m2	Kab. Kepulauan Sangihe	1.654.126.034	-	1.654.126.034
Jumlah			2.228.156.034	-	2.228.156.034

*Peralatan dan
Mesin*

Rp. 39,321,523,866

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 23,200,000 dan Rp.39,866,263,237,. Nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	39.866.263.237
Mutasi tambah:	
Pembelian	23.200.000
Transfer Masuk	36.879.000
Penghentian aset dari penggunaan	
Reklas Keluar	0
Reklas Masuk	0
Transfer Keluar	(35.722.800)
Saldo per 30 Juni 2025	39.890.619.437
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2025	39.321.523.866
Nilai Buku per 30 Juni 2025	569.095.571

Saldo perolehan nilai per 30 Juni 2025 adalah senilai Rp 39,321,523,866

*Gedung dan
Bangunan*

Rp 10,071,443,993

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 adalah Rp. 10,071,443,993 dan Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	10.071.443.993
Mutasi tambah:	-
Transfer Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Pengembangan Langsung	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Koreksi semua hasil penilaian kembali	-
koreksi nilai tim penertiban aset	-
Saldo per 30 Juni 2025	10.071.443.993
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(1.231.256.265)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	8.840.187.728

Tidak ada penambahan KDP

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp995.251.376*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.995.251.376 dan Rp.995.251.376. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	995.251.376
Mutasi tambah:	
Pengembangan melalui KDP	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Penyelesaian Pembangunan Langsung	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 30 Juni 2025	995.251.376
Akumulasi Penyusutan	266.444.416
Nilai Buku per 30 Juni 2025	728.806.960

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.385.000 dan Rp385.000. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2025. aset tersebut merupakan aset yang dihentikan untuk dilakukan penghapusan berupa Uninterruptible Power Supply (UPS) sejumlah 1 unit.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Dengan rincian ;

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	-
Saldo per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2025	0
30 Juni 2025	0

Sampai dengan Juni 2025 sudah tidak terdapat KDP, karena pekerjaan sudah selesai dan sudah membentuk aset.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp.*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing

40,819,224,547

Rp. 40,819,224,547 dan Rp 38,514,679,056 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2025*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	39.890.619.437	39.321.523.866	569.095.571
2	Gedung dan Bangunan	10.071.443.993	1.231.256.265	8.840.187.728
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	995.251.376	266.444.416	728.806.960
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		50.957.314.806	40.819.224.547	10.138.090.259

Aset Tak

Berwujud Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2025 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain

Rp.385,000

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.385,000 dan Rp. 385,000 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas atau tidak digunakan dalam operasi pemerintahan. Progres untuk sudah sampai pada status henti guna namun belum diusulkan untuk lelang.

Saldo Awal	385.000
Mutasi tambah:	0
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	0
Saldo per 31 Desember 2024	385.000
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2024	0
31 Desember	385.000

Terdapat penghentian aset dikarenakan rusak berat hasil BA Invent No B.1448/PSDKPSta.6/PL.110/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 dari penggunaan senilai Rp. 385.000, yang kemudian akan di usulkan penghapusan aset senilai Rp. 385.0000 sehingga pada 30 Juni 2025 masih terdapat aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan Rp. 385.000 berupa 1 Unit UPS dengan kondisi rusak berat.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp 385,000 dan Rp(385,000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya

*Uang Muka dari
KPPN Rp
60,000,000*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.

60,000,000 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 157,028,108*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 157,028,108 dan Rp.3,535,082. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang tersebut berupa Gaji Induk PNS, Gaji Induk PPPK dan Honor PPNPN.

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga

yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya,.

Ekuitas

Rp 12,878,615,055

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 12,878,615,055 dan Rp.15,377,868,706 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan
PNBP*

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Rp 0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Beban Pegawai

D.2 Beban Pegawai

Rp. 2,159,576,895

Jumlah Beban Pegawai periode 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 2,159,576,895. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Untuk jumlah pegawai di Stasiun PSDKP Tahuna sebanyak 27 Pegawai.

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1.061.519.766	1.815.622.605	1,92
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	135.519.199	193.228.678	26,00
Beban Lembur	-	48.910.000	
Beban Lembur PPPK	-	5.835.000	
Beban Tunjangan Khusus Kinerja	858.906.120	1.787.260.457	1,53
Beban Tunjangan Khusus Kinerja PPPK	103.631.810	183.383.671	19,00
Sub Total	-	-	
Pengembalian Belanja			#DIV/0!
Jumlah	2.159.576.895	4.034.240.411	186,81

*Beban
Persediaan Rp
73,295,234*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 73,295,234 dan Rp.70,784,150. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	29.264.700	70.784.150	-58,66%
Beban Persediaan Suku Cadang	44.030.534	-	0,00%
beban penyesuaian nilai persediaan	-	-	0,00%
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0,00%
Jumlah	73.295.234	70.784.150	3,55%

*Beban Barang
dan Jasa Rp
1,520,266,174*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,520,266,174 dan Rp. 2,938,361,073. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Kantor	246.618.500	825.375.204	-70,12%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	45.149.000	134.090.600	-66,33%
Beban Pengiriman Surat dinas PosPusat	101.200	1.671.400	-93,95%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	36.350.000	87.504.000	-58,46%
Beban Bahan	621.569.000	4.815.741.220	-87,09%
Beban Honor Output Kegiatan	22.960.000	140.100.000	-83,61%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	120.201.900	327.455.515	-63,29%
Beban barang Operasional Lainnya	2.253.778	220.910.000	-98,98%
Beban Langganan Listrik	18.991.000	149.159.500	-87,27%
Beban Langganan Telepon	79.322.250	151.653.542	-47,70%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	4.000.000	-100,00%
Beban Jasa Profesi	0	900.000	-100,00%
Beban Langganan Air	23.229.000	58.700.900	-60,43%
Beban jasa Lainnya	303.520.546	170.375.435	78,15%
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0,00%
Bebean Jasa Penanganan pandemi Covid19	0	0	0,00%
Jumlah	1.520.266.174	7.087.637.316	-78,55%

Beban

Pemeliharaan Rp
222,127,951

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 222,127,951 dan Rp. 266,158,485. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan dikarenakan semakin banyak belanja barang maupun Kontrak Pekerjaan baik itu Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Suku Cadang dan Jalan dan Jembatan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Periode 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	78.594.101	157.641.200	-50,14%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	143.533.850	2.001.206.026	-92,83%
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00%
Beban Persediaan Suku Cadang		235.806.819	-100,00%
Jumlah	222.127.951	2.394.654.045	-90,72%

*Beban
Perjalanan Dinas
Rp. 156,829,488*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 156,829,488 dan Rp. 757,067,481. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	137.819.937	1.573.863.227	-91,24%
Beban Perjalanan Tetap	0	0	0,00%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.950.000	171.210.000	-97,11%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		55.635.800	-100,00%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14.059.551	269.411.953	-94,78%
Jumlah	156.829.488	2.070.120.980	-92,42%

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 2,303,173,466

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,303,173,466 dan Rp. 4,713,321,250. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2025 dan 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.172.825.638	4.460.865.566	-51,29%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	112.380.415	216.520.857	-48,10%
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	9.928.000	19.856.000	-50,00%
Beban Penyusutan Irigasi	7.876.913	15.753.827	-50,00%
Beban Penyusutan Jaringan	162.500	325.000	-50,00%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.303.173.466	4.713.321.250	-51,13%

Beban Penyisihan

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban

*Piutang Tak
Tertagih Rp0*

untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp2,429,567.*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Periode 30 Juni 2025 sebesar Rp. 2,429,567, terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan aset Non lancar	2.429.567	10.393.008	-76,62%
Pendapatan Pelepasan Aset non Lancar	2.429.567	15.750.000	-84,57%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	5.356.992	-100,00%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	2.429.567	5.036.016	-51,76%

Pendapatan dari kegiatan Non Operasional berupa Selisih beban Persediaan. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp. 2,429,567, tanggal 9 Januari 2025 NTPN; 9B6BD0NA0DE65VCD, NTB; 972052809479 Rp.2,429,567 sesuai risalah lelang nomor 4/16.01/2025-01 tanggal 9 Januari 2025.

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp.
15,377,868,706*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar RP. 15,377,868.706 dan RP. 19,039,118,302

*Defisit LO
Rp 6,432,839,641*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(6,432,839,641) dan Rp(8,770,561,723). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang

muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp0*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp(4,617,112). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp 8,111 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas Rp.
3,933,585,990*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,933,585,990 dan Rp. 6,768,289,645. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dd pnbp, dk blnja lra

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada tahun 2025 dan 2024, DDEL sebesar Rp.0 sedangkan

DKEL sebesar Rp.0

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp.0

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SEBELUM TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

A. Pengendalian Penyerapan Anggaran

DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna (170445) Nomor: SP DIPA-032.05.2.170445/2025 tanggal 2 Desember 2024, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.14.293.185.000,- (*Empat belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*). Nilai anggaran tersebut terdiri dari 2 (dua) program, yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan serta

Program Dukungan Manajemen. Penjabaran 2 (dua) program tersebut dicakup dalam 4 (empat) kegiatan utama, yaitu: Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP, Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Dukungan Manajemen Internal. Sampai pada Triwulan II tahun 2025, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna (170445) telah melakukan revisi anggaran sebanyak 8 (delapan) kali. Penjelasan terhadap revisi Stasiun PSDKP Tahuna, sebagai berikut:

1) Revisi POK

a. Tema Revisi : Pemutahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan

b. Mekanisme Revisi

Melakukan penyesuaian dalam RO yang sama tanpa melakukan perubahan pada Halaman III DIPA.

c. Alasan/pertimbangan

Dilakukannya revisi POK untuk penyesuaian kebijakan belanja kegiatan.

d. Tujuan revisi anggaran

Untuk mengantisipasi keadaan kebijakan operasional perkantoran.

2) Revisi DJA

a. Tema Revisi : Revisi Efisiensi Belanja APBN

b. Mekanisme Revisi

- Penyesuaian dan *tagging* blokir kode A sesuai distribusi eselon 1;

c. Alasan / pertimbangan

Dilakukannya revisi DJA dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan kegiatan dan anggaran T.A. 2025 sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

d. Tujuan revisi anggaran

Melakukan penyesuaian belanja kegiatan teknis dan operasional.

1) Revisi Kanwil

a. Tema Revisi : Revisi Halaman III DIPA

b. Mekanisme Revisi

- Penyesuaian dan koreksi terhadap halaman IV DIPA;
- Pergeseran anggaran dalam RO yang sama.
- c. Alasan / pertimbangan

Dilakukannya revisi kanwil adalah untuk koreksi halaman III DIPA dan penyesuaian terhadap belanja kegiatan.
- d. Tujuan revisi anggaran

Perbaikan dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran khususnya pada Triwulan I.
- 2) Revisi DJA
 - a. Tema Revisi : Pergeseran RO Cadangan
 - b. Mekanisme Revisi
 - Pergeseran RO Cadangan dalam Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada untuk dikembalikan pada RO asal;
 - c. Alasan / pertimbangan

Dilakukannya revisi DJA adalah untuk koreksi dan penyesuaian belanja kegiatan.
 - d. Tujuan revisi anggaran

Tindak lanjut penyesuaian dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran.
- 3) Revisi DJA
 - a. Tema Revisi : Perubahan Catatan Halaman IV DIPA
 - b. Mekanisme Revisi
 - Pada satker pusat;
 - c. Alasan / pertimbangan

Buka blokir anggaran operasional perkantoran.
 - d. Tujuan revisi anggaran

Tindak lanjut penyesuaian dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran.
- 4) Revisi POK
 - a. Tema Revisi : Pemutahiran Operasional Kegiatan
 - b. Mekanisme Revisi
 - Kewenangan KPA;
 - c. Alasan / pertimbangan

Penyesuaian untuk dukungan kegiatan TPKP.

d. Tujuan revisi anggaran

Tindak lanjut penyesuaian dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran.

5) Revisi POK

a. Tema Revisi : Pemutahiran Operasional Kegiatan

b. Mekanisme Revisi

- Kewenangan KPA;

c. Alasan / pertimbangan

Penyesuaian untuk dukungan kegiatan TPKP.

d. Tujuan revisi anggaran

Tindak lanjut penyesuaian dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran.

6) Revisi DJA

a. Tema Revisi : Perubahan Catatan Halaman IV DIPA

b. Mekanisme Revisi

- Pada satker pusat;

c. Alasan / pertimbangan

Buka blokir kode-2 untuk anggaran operasional kapal pengawas (PNBP).

d. Tujuan revisi anggaran

Tindak lanjut penyesuaian dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran.